

Abstrak

Tinjauan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses persetujuan pemindahtanganan berupa Hibah Barang Milik Negara pada KPKNL Surabaya. Sesuai dengan peraturan yang berlaku mengenai Pemindahtanganan berupa Hibah pada BMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan diatur di dalam PMK 111 tahun 2016 tentang Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Tinjauan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi lapangan, dan dokumentasi. Sumber data yang dikumpulkan dalam tinjauan ini berasal dari data primer dan data sekunder. Hasil temuan lapangan yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan Hibah BMN pada KPKNL Surabaya berupa selain tanah dan bangunan pada satuan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melakukan Hibah BMN. Dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, tetapi dalam prosesnya terdapat kendala saat mengajukan permohonan hibahnya kurang lengkap ataupun salah dalam lampiran dokumen pendukung menjadikan prosesnya tertunda dan memakan waktu yang lebih lama. Pada prosesnya KPKNL Surabaya telah melakukan persetujuan Hibah BMN sudah sangat baik dan sesuai peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Pemindahtanganan BMN, Persetujuan Hibah BMN, Barang Milik Negara

Abstract

This review aims to determine the implementation of the transfer approval process in the form of State Property Grants at KPKNL Surabaya. In accordance with the applicable regulations regarding Transfer in the form of Grants to BMN which are regulated in Government Regulation Number 27 of 2014 as amended by Government Regulation Number 28 of 2020 and regulated in Minister of Finance Regulation 111 of 2016 concerning Transfer of State Property. This review was conducted with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out by interviews, field studies, and documentation. Sources of data collected in this review are primary and secondary data. The results of the field findings carried out by the author in the implementation of the BMN Grant at the Surabaya KPKNL in the form of land and buildings at satker the East Java Provincial Animal Husbandry Office satker are in accordance with the applicable regulations for conducting BMN Grants. The attached documents are in accordance with the applicable Government Regulations and Minister of Finance Regulations, but in the process there are obstacles when submitting the grant application, the application is incomplete or incorrect in the attachment of supporting documents, causing the process to be delayed and take longer. In the process, the Surabaya KPKNL has approved the BMN Grant, which is very good and in accordance with applicable regulations.

Keywords : *Transfer of BMN, BMN Grant Approval, State Property*